



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Faktor Penyebab Dan Sejarah Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara

Factors Causing and Historical Birth of Comparative Studies of Public Administration

Sri Yulianty Mozin^{1*}, Alexander H. Badjuka², Miranda Djapar³, Liswati Abdullah⁴, Sri Nandri Yanti Ismail⁵

¹⁻⁵Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: yulmozin@ung.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Nov, 2025

Revised: 25 Dec, 2025

Accepted: 19 Jan, 2026

Kata Kunci:

Administrasi public,
Globalisasi, Sejarah CPA,
Tata kelola Pemerintahan

Keywords:

Public Administration,
Globalization, History Of
CPA, Governance

DOI: [10.56338/jks.v9i1.9770](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9770)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab dan perkembangan sejarah lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara atau Comparative Public Administration (CPA) sebagai cabang ilmu administrasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah konsep, teori, dan kontribusi para ahli serta dokumen kelembagaan yang membentuk evolusi CPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya CPA didorong oleh empat faktor utama, yaitu: faktor politik dan sosial pasca dekolonialisasi yang memunculkan kebutuhan model birokrasi baru; faktor akademis melalui perkembangan metodologi ilmu sosial yang menuntut kajian lebih empiris; faktor praktis berupa kebutuhan pembangunan dan policy learning antarnegara; serta pengaruh globalisasi yang mendorong tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif. Secara historis, perkembangan CPA melalui lima fase utama mulai dari akar awal hingga kebangkitan kembali pada era modern. Kesimpulannya, CPA berperan penting sebagai instrumen komparatif dan reflektif dalam memperkuat kapasitas pemerintahan global di era globalisasi.

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that caused and shaped the historical development of Comparative Public Administration (CPA) as a branch of public administration. Using a qualitative approach through literature review, this study examines the concepts, theories, and contributions of experts as well as institutional documents that shaped the evolution of CPA. The results show that the emergence of CPA was driven by four main factors, namely: political and social factors after decolonization that gave rise to the need for a new bureaucratic model; academic factors through the development of social science methodologies that demanded more empirical studies; practical factors in the

form of development needs and policy learning between countries; and the influence of globalization that encouraged adaptive and innovative governance. Historically, the development of CPA went through five main phases, from its early roots to its revival in the modern era. In conclusion, CPA plays an important role as a comparative and reflective instrument in strengthening global governance capacity in the era of globalization.

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan elemen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam perumusan kebijakan publik serta penyediaan layanan kepada masyarakat. Perkembangan dinamika global seperti globalisasi, dekolonialisasi, dan reformasi manajemen publik (New Public Management) telah memperluas tantangan dan ruang lingkup administrasi negara lintas batas (Van der Wal et al., 2021). Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mempelajari bagaimana praktik administrasi negara berbeda antarnegara serta bagaimana praktik terbaik dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Pendekatan yang menjawab kebutuhan tersebut dikenal sebagai Studi Perbandingan Administrasi Negara atau Comparative Public Administration (CPA), yaitu bidang kajian yang membandingkan sistem, struktur, proses, dan hasil administrasi publik di berbagai negara (Jreisat, 2019). CPA memungkinkan analisis lintas-negara untuk memahami faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kinerja birokrasi, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi reformasi pemerintahan (Peters, 2018).

Secara historis, lahirnya CPA dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya dorongan akademik untuk membangun teori administrasi publik yang mampu menjelaskan variasi kelembagaan antarnegara pasca-Perang Dunia II. Kedua, munculnya organisasi seperti Comparative Administrative Group (CAG) yang berupaya membentuk kerangka teoritis lintas budaya. Ketiga, adanya transfer kebijakan dan tekanan dari lembaga donor internasional yang mempercepat penyebaran model administrasi Barat ke negara berkembang (Van der Wal et al., 2021; Jreisat, 2019). Proses tersebut kemudian menimbulkan perdebatan epistemologis antara universalisme teori Barat dan kebutuhan pendekatan yang lebih kontekstual dan dekolonial (Wenzelburger, 2022).

Selain faktor historis, perkembangan CPA juga didorong oleh alasan fungsional dan metodologis. Dalam praktiknya, CPA berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kapasitas administratif, terutama dalam menghadapi krisis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Schomaker & Bauer, 2020). Kemajuan teknologi data dan metode analisis komparatif juga memperkuat posisi CPA sebagai pendekatan ilmiah yang relevan di era globalisasi pemerintahan (Pierre, 2024).

Dalam dekade terakhir, pendekatan CPA mengalami kebangkitan baru dengan memperhatikan dimensi globalisasi dan konteks lokal, serta memperkaya metodologi melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran (mixed methods). Para peneliti seperti Van der Wal et al. (2021) menekankan bahwa CPA modern tidak hanya meneliti kesamaan dan perbedaan administratif, tetapi juga menelaah proses pembelajaran lintas negara (policy transfer) dan interaksi antaraktor global.

Penelitian yang dilakukan oleh Van der Wal et al. (2021) menyoroti bagaimana globalisasi mendorong CPA untuk meninggalkan paradigma “standar Barat” menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan multi-metode. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa CPA berperan dalam menjelaskan interaksi antarnegara dan adaptasi model administrasi publik di berbagai konteks. Sementara itu, Wenzelburger (2022) memberikan kritik terhadap pendekatan komparatif yang terlalu mengandalkan korelasi statistik, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan agensi lokal. Penelitian ini mendorong penggunaan pendekatan reflektif dan interdisipliner dalam CPA.

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan Comparative Public Administration (CPA) mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Van der Wal et al. (2021) menegaskan bahwa globalisasi telah mendorong CPA untuk meninggalkan pendekatan yang berpusat pada “standar Barat” dan beralih ke model yang lebih kontekstual, adaptif, serta menggunakan beragam

metode analisis. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami variasi sistem administrasi publik sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Sementara itu, Wenzelburger (2022) menambahkan dimensi kritis terhadap metode penelitian CPA dengan menyoroti keterbatasan pendekatan kuantitatif yang hanya berfokus pada korelasi statistik. Ia menekankan perlunya CPA mengintegrasikan pendekatan reflektif dan interdisipliner agar mampu menangkap kompleksitas realitas administrasi publik di berbagai konteks.

Dengan demikian, kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa masa depan CPA terletak pada kemampuan untuk menggabungkan analisis empiris yang kuat dengan pemahaman kontekstual yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan teori dan praktik administrasi publik yang lebih relevan secara global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, serta dinamika historis yang melatarbelakangi lahirnya dan berkembangnya Studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration/CPA). Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna dan konteks dari berbagai sumber ilmiah yang menggambarkan proses evolusi CPA dalam ilmu administrasi publik secara mendalam.

Metode studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri gagasan, pemikiran, serta temuan para ahli yang berkontribusi terhadap pembentukan dan perkembangan CPA. Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan, melainkan mengandalkan penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu: Data primer, berupa karya ilmiah klasik yang menjadi rujukan utama dalam perkembangan CPA, seperti tulisan Fred W. Riggs (*The Ecology of Public Administration*, *The Prismatic Model*), Dwight Waldo (*The Administrative State*), serta dokumen resmi dari Comparative Administration Group (CAG) di bawah American Society for Public Administration (ASPA). Dan Data sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi lembaga internasional seperti UNDP, World Bank, dan OECD yang membahas perkembangan administrasi publik dan perbandingan antarnegara. Semua sumber dipilih berdasarkan relevansi, validitas, dan keaktualannya terhadap fokus penelitian.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor penyebab dan perkembangan historis lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara, serta menggambarkan perubahan paradigma administrasi publik dari masa ke masa dalam konteks global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Studi Perbandingan Administrasi Negara

Latar umum kelahiran CPA

Studi Perbandingan Administrasi Negara (CPA) muncul sebagai cabang ilmu administrasi publik yang berkembang pesat setelah Perang Dunia II. Kelahiran CPA dipicu oleh meningkatnya kebutuhan untuk memahami bagaimana sistem administrasi berfungsi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Pada masa ini, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin baru memperoleh kemerdekaan dan menghadapi tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang efektif. Sebagaimana dikatakan van der Wal dkk. (2021): ‘Comparative public administration ... provides invaluable insights into the complexities ... across various political, social, economic, and cultural contexts.’’ Oleh karena itu, para ilmuwan dan praktisi administrasi mulai mempelajari bagaimana sistem birokrasi di negara maju dapat dibandingkan dan diadaptasi sesuai kondisi lokal. Seperti dijelaskan oleh Fred W. Riggs (1961) dalam bukunya *The Ecology of Public Administration*, setiap

sistem administrasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial-politik di mana ia berkembang.

Faktor Penyebab Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara

Ada beberapa faktor penyebab lahirnya studi perbandingan administrasi Negara antara lain sebagai berikut

Faktor Politik dan Sosial

Perubahan geopolitik global menjadi salah satu faktor penting lahirnya CPA. Setelah Perang Dunia II, muncul gelombang kemerdekaan di berbagai belahan dunia yang menuntut perbaikan struktur pemerintahan. Negara-negara baru ini membutuhkan sistem administrasi yang efisien untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Amerika Serikat dan lembaga internasional seperti PBB, USAID, dan Ford Foundation kemudian mendukung berbagai penelitian lintas negara guna membantu negara-negara berkembang mengembangkan kapasitas administrasinya. Hal ini menjadikan CPA sebagai sarana penting untuk policy learning dan capacity building antarnegara

Faktor Akademis dan Ilmiah

Dari sisi akademis, munculnya CPA juga dipengaruhi oleh kemajuan metodologi dalam ilmu sosial pada pertengahan abad ke-20. Pendekatan normatif yang hanya berfokus pada teori Barat mulai dianggap tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas administrasi publik di negara berkembang. Pemikiran kritis terhadap paradigma tradisional administrasi publik juga turut mendorong kelahiran Studi Perbandingan Administrasi Negara. Dwight Waldo, Di kutip Dalam Stillman, R. (2020). menolak konsep administrasi sebagai ilmu netral dan universal, serta menekankan perlunya mempertimbangkan nilai, politik, dan konteks sosial dalam praktik birokrasi Pandangan ini menjadi landasan epistemologis bagi munculnya pendekatan komparatif yang lebih empiris, pluralistik, dan sensitif terhadap perbedaan budaya administrasi antarnegara.

Faktor Kebutuhan Pembangunan dan Praktis

Selain aspek teoretis, faktor praktis juga sangat berpengaruh terhadap lahirnya CPA. Banyak negara berkembang menghadapi kegagalan dalam menerapkan model birokrasi Barat karena perbedaan konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, penelitian perbandingan menjadi penting untuk mencari pola administrasi yang paling sesuai. Di kutip Dalam Elliott, I. dkk (2024). Konsep development administration menjadi pusat perhatian pada 1950–1970-an, yaitu bagaimana administrasi publik dapat menjadi alat pembangunan nasional.

Faktor Globalisasi dan Relevansi Modern

Pada era globalisasi, CPA kembali mendapatkan perhatian karena meningkatnya interaksi dan ketergantungan antarnegara. Globalisasi membawa tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan, seperti reformasi birokrasi, transparansi, dan good governance. Peneliti seperti Jreisat (2005) dan Farazmand (2001) menekankan bahwa CPA kini tidak hanya berfungsi untuk memahami perbedaan antarnegara, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memperbaiki efektivitas administrasi publik secara global. Dengan demikian, CPA berkembang dari sekadar studi akademik menjadi pendekatan strategis dalam memahami dinamika pemerintahan modern di berbagai konteks dunia.

Sejarah Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara

Akar Awal (Akhir Abad ke-19 – 1930-an)

Awal Gagasan dan Pengaruh Pemikiran Klasik

Akar lahirnya studi perbandingan administrasi negara dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19, ketika ilmu administrasi publik mulai diakui sebagai bidang akademik tersendiri. Periode ini ditandai

oleh munculnya gagasan Woodrow Wilson melalui esainya yang berjudul “The Study of Administration” (1887). Wilson menekankan pentingnya memisahkan antara politik dan administrasi (politics-administration dichotomy) serta perlunya studi ilmiah tentang bagaimana pemerintahan dijalankan secara efektif. Walaupun tulisan Wilson belum menggunakan pendekatan perbandingan secara sistematis, gagasannya membuka jalan bagi kajian lintas negara, karena ia mengutip praktik-praktik pemerintahan dari Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bahan pembanding (Waldo, 1955).

Pengaruh Birokrasi Weberian dan Tradisi Eropa

Pada awal abad ke-20, pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional-legal juga memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan studi administrasi. Weber mengemukakan bahwa birokrasi yang efisien harus didasarkan pada aturan yang rasional, sistem hierarkis, serta profesionalisme aparatur. Pemikiran ini mendorong para akademisi untuk meneliti bagaimana model birokrasi yang berbeda berkembang di berbagai negara. Meskipun penelitian Weber masih bersifat sosiologis dan teoretis, karya tersebut menjadi fondasi awal bagi pendekatan perbandingan administrasi di kemudian hari. Dengan demikian, akar teoretis CPA banyak dipengaruhi oleh tradisi administrasi publik Eropa yang menekankan efisiensi, rasionalitas, dan struktur organisasi formal (Heady, 1984).

Periode Deskriptif dan Studi Pemerintahan Kolonial

Pada tahun 1900–1930-an, studi administrasi publik masih bersifat deskriptif dan normatif, berfokus pada bagaimana pemerintah seharusnya bekerja dengan baik. Para sarjana di Amerika Serikat dan Eropa meneliti berbagai bentuk pemerintahan kolonial, sistem hukum, dan struktur birokrasi di wilayah-wilayah jajahan. Namun, kajian ini belum memiliki kerangka konseptual yang jelas dan lebih banyak bersifat membandingkan praktik administratif secara permukaan. Menurut Riggs (1961), periode ini dapat disebut sebagai tahap “pra-ilmiah” dari studi perbandingan administrasi, karena belum ada pendekatan metodologis yang sistematis dalam membandingkan sistem administrasi lintas negara.

Pengaruh Ilmu Politik dan Administrasi Publik Amerika

Pada awal abad ke-20, administrasi publik di Amerika Serikat berkembang pesat sebagai respons terhadap tuntutan reformasi pemerintahan. Pemikiran para tokoh seperti Frank J. Goodnow, Leonard White, dan Luther Gulick memperkuat pandangan bahwa administrasi publik harus dipelajari secara ilmiah dan efisien. Leonard White, melalui bukunya *Introduction to the Study of Public Administration* (1926), menekankan pentingnya mempelajari prinsip-prinsip administrasi yang berlaku universal. Namun, studi pada masa ini masih sangat berorientasi pada konteks Amerika Serikat, sehingga belum berkembang menjadi studi komparatif antarnegara. Meski demikian, dasar-dasar metodologis yang dibangun pada periode ini menjadi titik pijak bagi perkembangan CPA setelah Perang Dunia II (Waldo, 1955).

Transisi Menuju Pendekatan Komparatif

Menjelang akhir 1930-an, mulai muncul kesadaran bahwa sistem administrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Para ilmuwan mulai mempertanyakan relevansi prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal terhadap kondisi negara-negara dengan latar budaya berbeda. Pemikiran ini menjadi cikal bakal pendekatan ekologis dan komparatif dalam studi administrasi publik. Gagasan inilah yang kemudian dikembangkan secara lebih matang oleh tokoh-tokoh seperti Fred W. Riggs pada 1960-an. Dengan demikian, periode akhir abad ke-19 hingga 1930-an dapat dianggap sebagai masa pembentukan fondasi intelektual dan metodologis bagi lahirnya studi perbandingan administrasi negara di masa modern (Riggs, 1961; Heady, 1984 Masa Kebangkitan (1950–1960-an)

Pada masa 1950–1960-an, studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration / CPA) mengalami kebangkitan yang signifikan. Periode ini ditandai oleh meningkatnya minat para ilmuwan administrasi publik untuk memahami perbedaan dan persamaan sistem administrasi di berbagai negara. Salah satu faktor pendorong kebangkitan ini adalah munculnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin setelah Perang Dunia II. Negara-negara tersebut menghadapi tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Para akademisi di negara maju seperti Amerika Serikat pun mulai tertarik untuk mempelajari bagaimana administrasi publik bekerja di berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Kebangkitan studi CPA juga dipengaruhi oleh dukungan lembaga internasional seperti Comparative Administration Group (CAG) di bawah American Society for Public Administration (ASPA) yang berdiri pada awal 1960-an. CAG berperan besar dalam mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap studi administrasi lintas negara. Mereka berupaya menyusun teori, model, dan kerangka kerja yang bisa digunakan untuk membandingkan sistem administrasi publik di berbagai belahan dunia. Fokusnya tidak hanya pada struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, budaya, dan politik yang membentuk perilaku birokrasi di setiap negara. Dengan demikian, CPA berkembang menjadi disiplin yang lebih luas dan multidimensional, tidak sekadar studi teknis mengenai manajemen pemerintahan.

Selain itu, pada periode kebangkitan ini, para sarjana seperti Fred W. Riggs berperan penting dalam membentuk dasar teoritis CPA melalui karya-karyanya, seperti “The Ecology of Public Administration” dan “The Prismatic Model”. Riggs memperkenalkan pendekatan ekologi yang menekankan bahwa administrasi publik harus dipahami dalam konteks lingkungan sosial dan budaya tempat ia beroperasi. Pemikiran Riggs membantu menggeser paradigma administrasi publik dari yang semula berpusat pada model Barat menuju pendekatan yang lebih komparatif, kontekstual, dan realistik terhadap kondisi negara berkembang. Oleh karena itu, masa kebangkitan CPA pada 1950–1960-an menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu administrasi, karena memperluas cakupan analisis dan menjadikan administrasi publik sebagai bidang studi yang bersifat global dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Periode Keemasan (1960–1970-an)

Pada periode 1960–1970-an, studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration / CPA) mencapai masa yang disebut sebagai periode keemasan. Pada masa ini, perhatian terhadap CPA meningkat pesat baik di kalangan akademisi maupun praktisi administrasi publik. Fokus utama studi CPA pada periode ini adalah mencari model dan teori universal yang dapat menjelaskan perbedaan serta persamaan sistem administrasi di berbagai negara. Para ilmuwan berupaya mengembangkan pendekatan ilmiah yang sistematis agar hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, terutama di negara-negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan pasca-kemerdekaan.

Salah satu ciri penting dari periode keemasan ini adalah semakin matangnya pendekatan teoritis dan metodologis dalam CPA. Lahirnya berbagai teori seperti ecological approach, structural-functional approach, dan development administration menunjukkan bahwa para ilmuwan berusaha memahami administrasi publik sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pemikiran Fred W. Riggs menjadi pusat perhatian pada masa ini melalui model pristik yang menggambarkan kondisi administrasi di negara berkembang sebagai percampuran antara sistem tradisional dan modern. Selain itu, lembaga seperti Comparative Administration Group (CAG) di bawah American Society for Public Administration (ASPA) gencar melakukan riset dan konferensi internasional untuk menyebarluaskan hasil studi perbandingan administrasi di berbagai negara.

Lebih jauh, periode keemasan ini juga ditandai oleh peran besar lembaga internasional seperti Ford Foundation dan USAID yang mendanai banyak penelitian CPA di negara-negara Asia, Afrika,

dan Amerika Latin. Melalui bantuan teknis dan akademik, para peneliti berupaya membantu negara berkembang memperkuat sistem administrasi publik mereka agar mampu mendukung proses pembangunan nasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, mulai muncul kritik terhadap CPA yang dinilai terlalu berorientasi pada Barat dan kurang memperhatikan konteks lokal masing-masing negara. Walaupun demikian, masa 1960–1970-an tetap dianggap sebagai periode paling produktif dan berpengaruh dalam sejarah CPA, karena pada masa inilah fondasi teoritis, metodologis, dan kelembagaan studi perbandingan administrasi negara benar-benar berkembang pesat dan memberikan arah bagi penelitian-penelitian administrasi publik di masa-masa berikutnya.

Periode Krisis dan Kritik (1980–1990-an)

Pada periode 1980–1990-an, studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration / CPA) memasuki masa krisis dan kritik. Setelah mengalami masa keemasan pada dekade sebelumnya, CPA mulai kehilangan arah dan relevansi di kalangan akademisi administrasi publik. Salah satu penyebab utama krisis ini adalah kegagalan pendekatan-pendekatan CPA klasik, seperti model ekologis Fred W. Riggs atau administrasi pembangunan, dalam memberikan solusi nyata terhadap permasalahan birokrasi dan pembangunan di negara-negara berkembang. Banyak penelitian CPA dinilai terlalu teoretis, normatif, dan tidak cukup memperhatikan realitas empiris yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Akibatnya, kepercayaan terhadap kemampuan CPA untuk menjawab persoalan administrasi lintas negara mulai menurun.

Selain itu, pada masa ini muncul arus pemikiran baru dalam administrasi publik, yaitu New Public Management (NPM), yang menekankan efisiensi, orientasi pasar, dan hasil (output) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan NPM yang berkembang pesat di negara-negara Barat membuat fokus studi administrasi publik bergeser dari aspek perbandingan antarnegara menjadi reformasi manajemen pemerintahan secara internal. Dominasi pendekatan NPM menyebabkan studi CPA dianggap kurang relevan dengan tuntutan modernisasi administrasi publik yang berorientasi pada efisiensi dan kinerja. Akibatnya, banyak lembaga penelitian dan program akademik yang sebelumnya mendukung CPA mulai beralih ke kajian reformasi birokrasi dan manajemen publik modern.

Meskipun demikian, periode krisis dan kritik ini juga memberikan refleksi penting bagi perkembangan CPA. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa CPA perlu melakukan pembaruan paradigma agar dapat kembali relevan. Muncul gagasan untuk menggabungkan pendekatan komparatif dengan studi kebijakan publik, governance, dan globalisasi. Para peneliti juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, serta politik lokal dalam setiap studi administrasi perbandingan, bukan sekadar meniru model Barat. Dengan demikian, meskipun masa 1980–1990-an dikenal sebagai periode krisis, fase ini justru menjadi titik balik bagi evolusi CPA, karena mendorong munculnya pendekatan yang lebih kritis, reflektif, dan adaptif terhadap dinamika global administrasi publik di era modern.

Periode Kebangkitan Kembali (2000-an – Sekarang)

Memasuki periode 2000-an hingga sekarang, studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration / CPA) mengalami kebangkitan kembali setelah melewati masa krisis pada dekade sebelumnya. Kebangkitan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya memahami administrasi publik dalam konteks global yang semakin kompleks dan saling terhubung. Fenomena seperti globalisasi, desentralisasi, reformasi birokrasi, dan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Dalam konteks ini, CPA kembali relevan karena mampu memberikan perspektif lintas negara untuk menganalisis bagaimana pemerintahan di berbagai belahan dunia menanggapi perubahan global tersebut. Fokus CPA modern tidak hanya pada perbandingan struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi

juga pada isu-isu seperti tata kelola (governance), akuntabilitas, transparansi, serta inovasi pelayanan publik.

Pada masa kebangkitan ini, para ilmuwan dan praktisi administrasi publik mengadopsi pendekatan multidisipliner dan kontekstual dalam kajian CPA. Peneliti mulai menggabungkan teori-teori dari bidang politik, ekonomi, sosiologi, dan teknologi untuk memahami dinamika administrasi publik secara lebih menyeluruh. Selain itu, muncul pula kecenderungan untuk mengembangkan model “good governance” yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Studi-studi CPA kontemporer juga semakin memperhatikan isu keberlanjutan (sustainability), etika birokrasi, serta keadilan sosial dalam tata kelola publik. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa CPA tidak lagi hanya berfokus pada perbandingan antarnegara, tetapi juga pada pertukaran pengetahuan global dan pembelajaran kebijakan lintas batas (policy transfer dan policy learning).

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi digital dan data global turut memperkuat kebangkitan CPA di era modern. Pemanfaatan big data, artificial intelligence, dan sistem informasi pemerintahan memungkinkan penelitian komparatif dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan akurat. Di sisi lain, lembaga internasional seperti OECD, UNDP, dan World Bank juga berperan aktif dalam mengembangkan indikator dan indeks tata kelola global yang menjadi bahan kajian bagi para peneliti CPA. Dengan demikian, periode 2000-an hingga sekarang menandai transformasi CPA menjadi disiplin yang eblih adaptif, empiris, dan berorientasi pada solusi global, sekaligus memperkuat peranannya dalam membantu negara-negara meningkatkan efektivitas dan kualitas pemerintahan di tengah tantangan global abad ke-21.

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa Studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration atau CPA) lahir sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi global yang menuntut pemahaman lintas negara terhadap praktik administrasi publik. Munculnya CPA tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab historis, seperti perkembangan negara-negara baru pasca Perang Dunia II, kebutuhan akan efisiensi dan modernisasi birokrasi, serta dorongan globalisasi yang menuntut adaptasi dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, lahir dan berkembangnya CPA merupakan hasil dari kombinasi antara kebutuhan praktis dalam pembangunan administrasi publik dan dorongan akademis untuk memahami keragaman sistem pemerintahan di berbagai konteks. CPA tidak hanya menjadi studi tentang perbandingan sistem administrasi, tetapi juga menjadi sarana reflektif untuk memperkuat kapasitas pemerintahan global, membangun teori yang inklusif, serta menegaskan pentingnya konteks lokal dalam praktik administrasi publik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Elliott, I. C., Puppim de Oliveira, J. A., & Wu, A. M. (2024). Public administration and development in (historical) perspective. *Public Administration and Development*, 44(4), 298-314.
- Jreisat, J. E. (2019). Comparative public administration and policy. Routledge.
- Peters, B. G. (2018). The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration. Routledge.
- Pierre, J. (2024). Back to Basics: A Comparative Analysis of Government ... *Public Administration* (Taylor & Francis).47(13),896-908
- Schomaker, R. M., & Bauer, M. W. (2020). What drives successful administrative performance during crises? Lessons from refugee migration and the Covid-19 pandemic. *Public administration review*, 80(5), 845-850.
- Stillman, R. (2020). Dwight Waldo: Administrative Theorist for Our Times. In *Dwight Waldo* (pp. 5-7). Routledge.
- Van der Wal, Z., & kolega. (2021). Comparative Public Administration in a Globalized World: Moving

Beyond Standard Assumptions Toward Increased Understanding. *Public Administration Review.* 81(2), 295-298

Wenzelburger, G., & Jensen, C. (2022). Comparative Public Policy Analysis: Shortcomings, Pitfalls, and Avenues for the Future. *Politische Vierteljahrsschrift*, 63(2), 295-313.